

LKJIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BPS DMD
PROVINSI JAWA TENGAH
2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunannya, diupayakan untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai hasil kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2017. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Desember 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



S.P. ANDRIANI S., SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19580612 198703 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum Organisasi.....	3
E. Fungsi Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	10
F. Permasalahan Utama yang Dihadapi.....	14
BAB II PERJANJIAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	39
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	40
Lampiran I Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	
Lampiran II Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.2	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.....	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis Tujuan-1)	22
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Teknis Tahun 2017	24
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Fungsional Tahun 2017	27
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tahun 2017	29
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Tahun 2017	30
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2017	31
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN Tahun 2017	32
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis Tujuan – 2).....	34
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Berdasar Kinerja Pencapaian Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016).....	5
Gambar 3.1	Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2017	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi. Segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Demikian pula dalam sebuah negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas utama pegawai ASN yaitu :

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi untuk mempersiapkan SDM ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas melalui pengembangan kompetensi SDM aparatur agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellence public service*). Oleh

karena itu, BPSDMD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan LKjIP BPSDMD Provinsi Jawa Tahun 2017 yaitu :

1. Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Pertanggungjawaban kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017;
3. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi ditahun yang akan datang.
4. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Gambaran Umum Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memunculkan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termasuk diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan (nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008) yang di tahun 2017 resmi bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan nomenklatur bukan sekedar pergantian “kulit”, namun membawa konsekuensi perubahan tugas dan fungsi yang cukup signifikan. Berdasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut menyiratkan sebuah tanggung jawab yang

semakin luas, bukan lagi sekedar penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya ASN;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

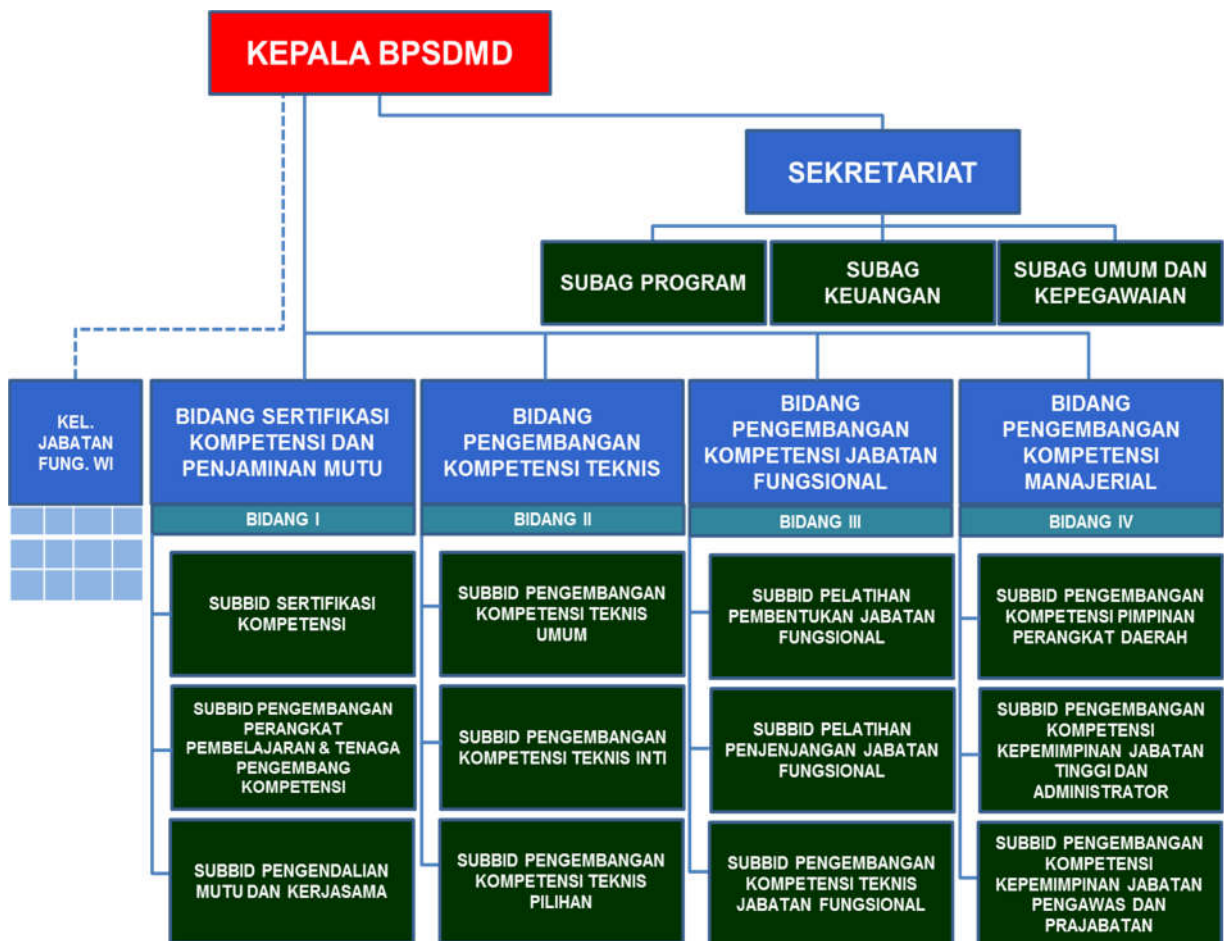
Jenjang struktural organisasi terdiri dari Kepala sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki komposisi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

6. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
 (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016)



Komposisi jabatan struktural di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat eselon III, dan 15 (lima belas) orang Pejabat Eselon IV. Dimana pada tahun 2017 (per bulan Oktober), terdapat

kekosongan pada 1 jabatan eselon III yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis. Sedangkan untuk jabatan fungsional yang ada di BPSDMD terdiri dari 1 (satu) orang dokter umum dan Widyaiswara yang sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang tersebar di 5 lokasi, yaitu di BPSDMD, BPSDM Soropadan, BPSDM Peternakan Ungaran, BPTPK Gombang dan Balatkop Semarang.

Secara rinci sumber daya manusia BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Sumber Daya Manusia BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

No	Pendidikan	Jabatan			Pelaksana	Jabfung	Non PNS	Jumlah
		Es. II	Es. III	Es. IV				
1	S3	-	-	-	-	5	-	5
2	S2	-	4	14	10	45	-	73
3	S1/D-IV	1	-	1	43	8	8	61
4	Diploma	-	-	-	-	-	4	4
5	SLTA	-	-	-	44	-	40	84
6	SLTP	-	-	-	11	-	2	13
7	SD	-	-	-	11	-	-	11
Jumlah		1	4	15	119	58	54	251

* data SDM per 30 Desember 2017

Tabel 1.2.
Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

A. PRASARANA UTAMA			
No	Uraian Ruang	Th. 2017	
		Jumlah	Kapasitas
I.	Aula :	2 Unit	
1	Balai Sasana Widya Praja	1	500 org
2	Aula Muria	1	300 org
Jumlah			800 org
Jumlah I			1.500 org

A. PRASARANA UTAMA			
No	Uraian Ruang	Th. 2017	
		Jumlah	Kapasitas
II.	Gedung Pendidikan / Prasarana Kegiatan Pembelajaran	6 unit	
1	Eksekutif Merapi		
	Ruang Kelas	1 unit	100 org
	Ruang Diskusi	6 unit @ 15 org	90 org
	Ruang Transit WI	1 unit	
	Ruang Kesehatan	1 unit	
	Sekretariat Panitia	1 unit	
	Jumlah		190 org
2	Sindoro		
	Ruang Kelas Lt I	4 unit @ 40 org	160 org
	Ruang Kelas Lt II	4 unit @ 60 org	240 org
	Ruang Transit WI	1 unit	
	Sekretariat Panitia	1 unit	
	Jumlah		480 org
3	Merbabu		
	Ruang Kelas Lt I	2 unit @ 40 org	80 org
	Ruang kelas Lt II	8 unit @ 40 org	240 org
	Ruang Diskusi Lt. I	2 unit @ 40 org	80 org
	Sekretariat Panitia	1 unit	
	Jumlah		400 org
4	Muria		
	Ruang Kelas Muria I	1 unit	40 org
	Ruang Kelas Muria II	1 unit	40 org
	Jumlah		80 org
5	Sumbing I		
	Ruang Kelas Lt I	4 unit @ 40 org	160 org
	Ruang Kelas Lt II	4 unit @ 40 org	160 org
	Ruang Transit WI	2 unit	
	Sekretariat Panitia	2 unit	
	Jumlah		320 org
6	Sumbing 2		
	Ruang Kelas Lt I	2unit @40 org	80 org
	Ruang Seminar (hall)	1 unit	150 org
	Ruang Transit WI	1 unit	
	Sekretariat Panitia	1 unit	
	Jumlah		230 org
	JUMLAH II		1.700 org
III.	Asrama		
1	Sindoro I		
	Lantai I	9 kmr @ 4 org	36 org

A. PRASARANA UTAMA			
No	Uraian Ruang	Th. 2017	
		Jumlah	Kapasitas
	Lantai II	21 kmr @ 2 org	42 org
	Lantai III	21 kmr @ 2 org	44 org
	Jumlah		120 org
2	Sindoro II		
	Lantai I	6 kmr @ 2 org	12 org
	Lantai II	25 kmr @ 4 org	100 org
	Lantai III	25 kmr @ 4 org	100 org
	Jumlah		112 org
3	Sindoro III		
	Lantai I	9 kmr @ 2 org	18 org
	Lantai II	21 kmr @ 2 org	42 org
	Lantai III	22 kmr @ 2 org	44 org
	Jumlah		104 org
4	Muria I		
	Lantai I	14 kmr @ 2 org	28 org
	Lantai II	8 kmr @ 2 org	16 org
	Jumlah		44 org
5	Muria II		
	Lantai I	16 kmr @ 2 org	32 org
	Jumlah		32 org
6	Sumbing I		
	Lantai I	9 kmr @ 2 org	18 org
	Lantai II	8 kmr @ 2 org	16 org
	Jumlah		34 org
7	Sumbing II		
	Lantai I	12 kmr @ 4 org	48 org
	Lantai II	12 kmr @ 4 org	48 org
	Jumlah		96 org
8	Sumbing III		
	Lantai I	16 kmr @ 4 org	64 org
	Lantai II	17 kmr @ 4 org	68 org
	Jumlah		132 org
9	Sumbing IV		
	Lantai I	11 kmr @ 2 org	22 org
	Lantai II	12 kmr @ 2 org	24 org
	Jumlah		48 org
10	Eksekutif Merapi		
	Lantai I	21 kmr @ 2 org	42 org
	Lantai II	29 kmr @ 2 org	58 org
	Jumlah		100 org
	JUMLAH III		822 org
IV	Menza / Ruang Makan	4 unit	
1	Ruang Makan Eksekutif Merapi	1 unit	110 org

A. PRASARANA UTAMA			
No	Uraian Ruang	Th. 2017	
		Jumlah	Kapasitas
2	Menza Sindoro	1 unit	300 org
3	Menza Muria	1 unit	80 org
4	Menza Sumbing	1 unit	300 org
JUMLAH IV			790 org
TOTAL			4.812 org

B. PRASARANA PENDUKUNG			
No	Uraian Ruang / Barang	Th. 2017	
		Jumlah	Kapasitas
1	Ruang Kantor	1 unit	300 org
2	Laboratorium Bahasa	1 unit	40 org
3	Laboratorium Komputer	1 unit	40 org
4	Laboratorium Perkantoran	1 unit	40 org
5	Rumah Dinas Pimpinan	1 unit	
6	Wisma Tenaga Kediklatan	1 unit	
7	Perpustakaan	1 unit	
8	Sarana Olah Raga		
	- Lapangan Sepak Bola	1 unit	
	- Lapangan Tennis	2 unit	
	- Lapangan Voli	1 unit	
	- Meja Billiard	1 unit	
	- <i>Fitness Center</i>	1 unit	10 org
	- Sepeda Gunung	4 unit	
9	Fasilitas Rekreasi		
	- Kebun Koleksi Satwa	1 unit	
10	Koperasi	1 unit	
11	Poliklinik	1 unit	
12	Tempat Ibadah	1 unit	
13	<i>Loundry centre</i>	1 unit	
14	Genset	6 unit	
15	Pos Keamanan	4 unit	
16	Kantin	1 unit	
17	Kendaraan Dinas		
	- Bus Non AC	1 unit	25 org
	- Ambulans	1 unit	-
	- Station Wagon	10 unit	
	- Sepeda Motor	12 unit	
	- Pick Up	1 unit	
	- Kendaraan Roda 3	2 unit	

C. SARANA UTAMA		
No	Uraian Barang	Th. 2017
		Jumlah
1	Papan Tulis	38 unit
2	Flip Chart	74 unit
3	Sarana Multimedia	
	- <i>Wireless Presentation System (WPS)</i>	20 unit
	- <i>Interactive White Board (IWB)</i>	5 unit
	- TV Plasma/LCD	280 unit
	- Sound system	10 unit
	- CD/DVD Player	10 unit
	- Audio Recorder	4 unit
	- Video Recorder	4 unit
	- Kamera digital	20 unit
4	Komputer	180 unit
5	Laptop / Notebook	70 unit
6	LCD Projector	50 unit
7	Jaringan Wifi/internet	2 unit
8	CCTV	20 unit
9	Buku Referensi	4.000 buku
10	Modul / Bahan Ajar	100 dok

* data per 30 Desember 2017

E. Fungsi Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dengan Visi : **“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju Sejahtera dan Lestari”** dan ditetapkan 6 (enam) Misi yang mencakup tentang kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, perekonomian daerah, politik dan **tata kelola pemerintahan**, sumber daya alam, sarana prasarana wilayah dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- 3) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;**
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mendukung perwujudan Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”** yang selaras dengan misi ke-3 RPJPD Jawa Tengah 2005 – 2025 yaitu : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh **kompetensi dan profesionalitas aparatur**, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring.

Pemerintahan yang bersih dan baik telah menjadi isu nasional, begitu juga di Jawa Tengah. Salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lepas dari prinsip pengelolaan yang baik terhadap **kelembagaan (organisasi)**, **ketatalaksanaan (business process)**, dan yang paling utama adalah **sumber daya manusia aparatur**. Oleh karena itu, program reformasi birokrasi harus melibatkan atau mendasarkan pada ketiga komponen utama tersebut disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

Sumber daya aparatur mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; pengelola pemerintahan; manager / *corporate leader*; dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga tuntutan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung akan membawa konsekuensi pada masalah kinerja aparatur.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Harapannya tentu agar meningkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku aparatur, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan secara kompeten dan berintegritas. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan aparatur BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2013 – 2018 berikut target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai.

Berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah antara lain : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat **Nawa Cita**.

Berbagai regulasi tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Aparatur. Termasuk pula yang cukup mendasar adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga turut mempengaruhi pola pengembangan kompetensi tersebut. Dalam UU tersebut urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berpengaruh terhadap struktur organisasi dan tata kerja instansi daerah, dimana nantinya satu instansi akan menangani satu urusan. Adanya perubahan urusan dan organisasi, berpengaruh pula terhadap jabatan dalam organisasi tersebut. Sehingga keselarasan urusan dan wewenang akan memudahkan dalam menyusun standar kompetensi jabatan PNS sebagai dasar penyusunan pola pengembangan kompetensi SDM Aparatur demi mewujudkan ASN yang profesional.

Ada tiga komponen utama dalam upaya pengembangan SDM Aparatur yaitu : (1) standarisasi (kompetensi, lisensi dan perangkat pembelajaran); (2) sertifikasi; dan (3) pengembangan kompetensi (pelatihan, seminar, kursus dll). Implementasi ketiga komponen pengembangan SDM Aparatur tersebut sudah mulai dirintis sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur keterpaduan antar lembaga dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan peta dan jenis jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penempatan pegawai ASN dalam jabatan, penetapan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dan evaluasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan diklat, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan pengembangan SDM Aparatur serta melihat kondisi dan kebutuhan ASN saat ini dan di masa mendatang,

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga telah mulai merintis suatu konsep pengembangan SDM Aparatur yang terintegrasi menuju *Jateng Corporate University (J-CU)*. Konsep ini merupakan sebuah model pengembangan SDM Aparatur yang komprehensif melalui beragam jenis pengembangan kompetensi dengan penanganan terhadap berbagai perangkat pendukungnya, seperti regulasi, metode, sarana prasarana serta pemanfaatan beragam sumber daya. Artinya, pelaksanaan tugas fungsi BPSDMD tak lagi hanya sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan saja, melainkan lebih mengarah pada pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dalam arti luas, sekaligus menjadi lembaga penjaminan mutu kompetensi ASN demi tercapainya tujuan yaitu terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas.

F. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur diantaranya yaitu :

1. Belum adanya standar mutu pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional yang berbasis kompetensi, sehingga kualitas pelaksanaan diklat belum sepenuhnya terjamin;
2. Belum adanya peta kompetensi berdasar jabatan pegawai di tiap-tiap instansi pengirim, sehingga tak jarang peserta yang dikirim tidak sesuai dengan jenis diklat yang diikutinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPSDMD turut menunjang visi dan misi pembangunan yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat efektif, efisien dan akuntabel, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
2. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 Perubahan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
3. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; dan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud pencapaian visi dan misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi
2. Meningkatkan pengembangan dan pengendalian mutu diklat

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut yaitu :

1. Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi
2. Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat

Keterkaitan antara indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	Tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ASN yang mengikuti diklat • Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi
2	Meningkatkan pengembangan dan pengendalian mutu diklat	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	Tingkat efektivitas pengembangan dan pengendalian mutu diklat <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumberdaya yang dimiliki. Sehingga dalam perjanjian kinerja terdapat indikator kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Sebagai wujud penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 5 (lima) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang didukung oleh **APBD Provinsi Jawa Tengah** sejumlah **Rp 77.806.612.000,- (Belanja Langsung Rp 51.379.690.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 26.426.922.000,-)**. Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017, tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Sedangkan gambaran singkat mengenai keterkaitan antara tujuan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi		
Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	Tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> 1) Jumlah ASN yang mengikuti diklat 2) Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	83 % 1) 3.536 orang 2) 250 orang
2. Meningkatkan pengembangan dan pengendalian mutu diklat		
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	Tingkat efektivitas pengembangan dan pengendalian mutu diklat <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat	100 % 286 dokumen

Selain perjanjian kerja antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD, perjanjian kinerja juga dibuat sebagai penugasan dari pimpinan instansi tertinggi kepada pimpinan di level di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Selain kinerja yang disepakati atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk keluaran (*output*) dan hasil kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama kurun waktu satu tahun, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah banyak meraih penghargaan, berkreasi, serta melakukan berbagai inovasi. Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan mekanisme kerja maupun SDM kediklatan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sekaligus manajemen pengembangan kompetensi, BPSDMD telah merintis suatu model pengembangan SDM ASN menuju *Jateng Corporate University*;
2. Melakukan audit internal dan eksternal melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015;
3. Mengintensifkan kinerja Komite Penjamin Mutu Diklat yang beranggotakan para pakar di bidangnya dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah;
4. Mengintensifkan pertemuan-pertemuan / rapat-rapat internal baik dengan pejabat struktural, widyaiswara maupun staf, sehingga terwujud sinkronisasi program antar bidang dan seluruh jajaran BPSDMD memiliki persepsi yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan;
5. Peningkatan kualitas SDM baik pengelola maupun tenaga pengembang kompetensi (Widyaiswara) melalui berbagai jenis program pengembangan kompetensi seperti diklat, bintek, workshop, dll;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar;
7. LSP-Pemda Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (bekerjasama dengan LSP-PDN BPSDM Kementerian Dalam Negeri) memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi untuk

penyesuaian / *Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Kabupaten Klaten) dan juga Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan (bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup).

Disamping itu beberapa pengakuan dan penghargaan telah diperoleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah :

1. Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001:2015 dengan Nomor Registrasi 16.00.1.14149, dari Badan Sertifikasi PT. TUV Nord Indonesia diperoleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk layanan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III IV, Prajabatan CPNS Golongan I, II, III, Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
2. Sertifikat Nomor 207/BKS/KS.02/12/2017 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, menyatakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi penuh untuk menyelenggarakan program Diklat di Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Sertifikat dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1-2189 Tahun 2017 menyatakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Diklat Pemerintah yang telah memenuhi standar akreditasi untuk menyelenggarakan Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam Pelajaran;
4. Penghargaan dari LAN RI sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Penyelenggara Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan;
5. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif Peringkat VI dalam Menyampaikan Menyediakan, Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan

proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, ada 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu :

TUJUAN 1	<i>Meningkatkan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi</i>
SASARAN	<i>Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi</i>
Indikator Kinerja	1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat 2. Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi

Pengukuran capaian kinerja sasaran berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun IKU untuk mencapai Sasaran Strategis Tujuan-1 yaitu **jumlah ASN yang mengikuti diklat** dan **jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi**, dengan capaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
(Sasaran Strategis Tujuan-1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2016 (org)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (orang)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2017 (%)
			Target Kinerja (org)	Realisasi (org)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi</i>	1. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	43.128	42.658	47.168	110.57	45.853	102.87
	2. Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	202	250	279	111,60	200	240.50
	Jumlah	43.330	42.908	47.447		46.053	
			Rerata (%)		109,51		103,46

Berdasarkan tabel tersebut, rerata capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu *“Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi”* sampai dengan tahun 2017 mencapai 109,51%. Sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa capaian Sasaran-1 berkategori **Sangat Baik**. Adapun capaian kinerja sesuai indikator dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat

Capaian kinerja hingga bulan Desember 2017 yaitu 47.168 orang atau 110,57% bila dibandingkan dengan target kinerja RKPD Tahun 2017 yaitu sejumlah 42.658 orang, sedangkan bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu 45.853 orang, capaian kinerja mencapai 102,87%. Artinya, realisasi indikator kinerja telah melebihi target. Surplus pencapaian target ini sebenarnya juga telah terjadi di tahun sebelumnya, dimana realisasi jumlah PNS yang mengikuti diklat hingga tahun 2016 sejumlah 43.128 orang dari target sesuai RKPD Tahun 2016 sejumlah 39.313 orang (108,12%).

Capaian kinerja Sasaran-1 dengan indikator jumlah ASN yang mengikuti diklat disajikan dalam Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat tahun 2017 berdasarkan jenis diklat adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2017



Dari grafik tersebut, diketahui jumlah alumni Diklat Teknis menempati urutan terbanyak sejumlah 1.574 orang atau 38,96%, kemudian disusul dengan alumni Diklat Prajabatan sejumlah 1.042 orang atau 25,79%, alumni diklat fungsional sejumlah 760 orang atau 18,81%, alumni Diklat Kepemimpinan sebanyak 634 orang atau 15,69% dan alumni Diklat Pemda sebanyak 30 orang atau 0,74%. Adapun rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Sasaran Strategis Tujuan-1 sebagai berikut :

a) Alumni Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Sesuai struktur bidang pelaksana, Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terbagi atas kelompok Diklat Teknis Umum, Diklat Teknis Inti dan Diklat Teknis Pilihan.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan realisasi *output* sejumlah **1.574** alumni Diklat Teknis dari target peserta yang telah ditetapkan yaitu **1.580** orang (99,62%). Selisih kekurangan sejumlah 6 (enam) orang disebabkan oleh karena calon peserta mengundurkan diri sehubungan dengan adanya penugasan lain dari pimpinan instansi. Secara rinci capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Diklat Teknis Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam	35	35
2.	Diklat Teknis Standar Pelayanan Publik	30	30
3.	Diklat Teknis Perbenihan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	35	35
4.	Diklat Teknis Pendampingan Sertifikasi Organik Tanaman	35	35

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
	Pangan		
5.	Diklat Teknis Teknologi Pengendalian Limbah	35	35
6.	Diklat Teknis Presentasi Berbasis Multi Media Angk. I	30	30
7.	Diklat Teknis Presentasi Berbasis Multi Media Angk. II	30	29
8.	Diklat Teknis Manajemen Sekolah	35	35
9.	Diklat Teknis Manajemen Lalu Lintas	35	35
10.	Diklat Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan Berbasis Ketahanan dan Keamanan	35	34
11.	Diklat Teknis Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	35	35
12.	Diklat Teknis Deteksi Dini / Intelegent	35	35
13.	Diklat Teknis Analisa Jabatan Angk. I	35	33
14.	Diklat Teknis Analisa Jabatan Angk. II	35	37
15.	Diklat Teknis Administrasi dasar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Jateng Angk. I	31	25
16.	Diklat Teknis Administrasi dasar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Jateng Angk. II	31	25
17.	Diklat Teknis Administrasi dasar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Jateng Angk. III	31	37
18.	Diklat Teknis Administrasi dasar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Jateng Angk. IV	31	37
19.	Diklat Teknis Perencanaan & Penganggaran Angk. I	35	35
20.	Diklat Teknis Perencanaan & Penganggaran Angk. II	35	35
21.	Diklat Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Angk. I	35	33
22.	Diklat Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Angk. II	35	37
23.	Diklat Teknis SAKIP Angk. I	30	30
24.	Diklat Teknis SAKIP Angk. II	30	30
25.	Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrua Angk. I	30	27
26.	Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrua Angk. II	30	33
27.	Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Angk. I	35	33
28.	Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Angk. II	35	36
29.	Diklat Teknis Audit Investigasi Angk. I	35	35
30.	Diklat Teknis Audit Investigasi Angk. II	35	35
31.	Diklat Teknis Pengelolaan Aset Angk. I	35	35
32.	Diklat Teknis Pengelolaan Aset Angk. II	35	35
33.	Diklat Teknis Penyusutan Arsip	35	35
34.	Diklat Teknis Pranata Humas Angk. I	35	35
35.	Diklat Teknis Pranata Humas Angk. II	35	35

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
36.	Diklat Teknis Bahasa Inggris Angk. I	35	31
37.	Diklat Teknis Bahasa Inggris Angk. II	35	38
38.	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Angk. I	35	31
39.	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Angk. II	35	38
40.	Pembekalan Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengguna Anggaran	48	48
41.	Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa utk PPK	48	48
42.	Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa utk PPTK Angk. I	30	23
43.	Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa utk PPTK Angk. II	30	22
44.	Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa utk PPTK Angk. III	30	36
45.	Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa utk PPTK Angk. IV	30	38
46.	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam (BIP) Angk. I	25	25
47.	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam (BIP) Angk. II	25	25
	TOTAL	1.580	1.574
	PERSENTASE ALUMNI DIKLAT TEKNIS (%)		99,62

Capaian kinerja di tahun 2017 yaitu 99,62%, dimana hasil ini lebih baik bila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2016 yang hanya mencapai 87,95%. Selain itu, terdapat pula diversifikasi jenis pengembangan kompetensi teknis, seperti misalnya pembekalan pengadaan barang/jasa bagi Pengguna Anggaran, PPK dan PPTK sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi aparatur di bidang pengadaan barang/jasa.

b) Alumni Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah antara lain berupa : diklat pembentukan, diklat penjenjangan serta pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional dengan realisasi *output* sejumlah **760 orang** alumni Diklat Fungsional sesuai target perencanaan. Rincian data realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Diklat Fungsional Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	TOT Revolusi Mental	30	30
2.	Diklat Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	30	30
3.	Diklat Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli Angkt. I	30	30
4.	Diklat Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli Angkt. II	30	30
5.	Diklat Distric Food Inspector (Pengawasan Pangan Daerah)	35	35
6.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Angkt. I	30	30
7.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Angkt. II	30	30
8.	Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)	30	30
9.	TOT Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas	30	30
10.	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli	30	30
11.	Diklat Penyuluh Keamanan Pangan	35	35
12.	Diklat Jabatan Fungsional Nutrisionis Jenjang Ahli	30	30
13.	Diklat Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman	30	30
14.	Diklat Dasar Alih Penyuluh Pertanian	30	30
15.	Diklat Surveilans Kesehatan	30	30
16.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil	30	30
17.	Diklat Kesehatan Kerja Bagi Petugas Kesehatan	30	30
18.	Diklat Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial Dalam	30	30

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
	Penanggulangan Kemiskinan		
19.	Diklat Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	30	30
20.	Diklat Pengangkatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	30	30
21.	TOT Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	30	30
22.	Diklat Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli	30	30
23.	Diklat Analisis Kepegawaian Keahlian	30	30
24.	Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan	30	30
25.	Pelatihan Penerapan Kebijakan Latsar CPNS/Training of Facilitator (TOF)	30	30
TOTAL		760	760
PERSENTASE ALUMNI DIKLAT FUNGSIONAL (%)			100

Capaian kinerja di tahun 2017 yaitu 100% atau sesuai dengan target. Hasil ini lebih baik bila dibandingkan capaian kinerja di tahun 2016, yang hanya mencapai 99,49 %.

c) Alumni Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dengan realisasi *output* sejumlah **634** orang dari target peserta sejumlah **640 orang** yang telah ditetapkan. Selisih kekurangan sejumlah 6 (enam) orang yang disebabkan oleh 5 (lima) orang calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang penetapan pesertanya merupakan wewenang LAN RI, sedangkan 1 (satu) orang peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III mengundurkan diri karena

kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Secara rinci capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	120	115
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	240	239
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	280	280
	TOTAL	640	634
PERSENTASE ALUMNI DIKLAT KEPEMIMPINAN (%)			99,40

Dari segi persentase capaian kinerja di tahun 2017 hampir sama dengan capaian kinerja di tahun 2016 yaitu sebesar 99,40 %, hanya berbeda pada jumlah pesertanya saja.

d) Alumni Diklat Pra Jabatan

Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah Diklat Prajabatan Golongan III (Umum) dari Kemenristek Dikti serta Diklat Prajabatan Golongan II dan III Tenaga Non Honorer Pengangkatan Khusus, yaitu bagi tenaga Bidan dan Penyuluh Kehutanan di Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dengan realisasi *output*

sejumlah **1.042** alumni Diklat dari target peserta **1.054 orang** yang ditetapkan. Tidak tercapainya target peserta karena ada sejumlah 12 (dua belas) calon peserta tidak dapat mengikuti diklat dengan beberapa faktor penyebab, yaitu : 9 (sembilan) orang calon peserta sedang mengikuti tugas belajar, 2 (dua) orang melahirkan dan 1 (satu) orang meninggal dunia. Secara rinci realisasi peserta Diklat Prajabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta Kegiatan Diklat Pra Jabatan Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Prajabatan Gol. III (Umum)	531	521
2.	Diklat Prajabatan Pengangkatan Khusus (Non Honorer)	523	521
	TOTAL	1.054	1.042
PERSENTASE ALUMNI DIKLAT PRAJABATAN (%)			98,86

Capaian kinerja di tahun 2017 yaitu 98,86 %, relatif lebih rendah bila dibandingkan kinerja di tahun 2016 yang mencapai 99,80%. Namun demikian, realisasi peserta Diklat Prajabatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu lebih besar daripada target peserta yang tertuang di RPJMD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya melaksanakan regulasi hasil kebijakan, serta adanya permintaan kerjasama penyelenggaraan diklat prajabatan dari instansi lain (di luar lingkup Provinsi Jawa Tengah). Selain itu, kegiatan ini tetap dianggarkan pada tahun berikutnya karena adanya regulasi kebijakan pengangkatan CPNS khusus bagi para pegawai non honorer sehingga langkah percepatan dibutuhkan melalui pelaksanaan diklat prajabatan tersebut.

e) Alumni Diklat Pemerintahan Daerah

Diklat Pemerintahan Daerah adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perencanaan,

administrasi dan kepemimpinan bagi para aparatur perangkat daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (lingkup Kelurahan dan Kecamatan).

Pencapaian target sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah, yang mana di tahun 2017, kegiatan Diklat Pemda dilakukan pada para lurah dengan realisasi *output* kegiatan Diklat Pemda sejumlah **30** alumni Diklat sesuai dengan target peserta yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Diklat Pemerintahan Daerah Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Diklat Pemda	30	30
	TOTAL	30	30
	PERSENTASE ALUMNI DIKLAT PEMDA (%)		100

Dari segi persentase, capaian kinerja di tahun 2017 relatif sama dengan capaian kinerja di tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi para aparatur pemda seperti aparatur desa dan kecamatan ini makin meningkat seiring dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan intensifikasi terhadap penyelenggaraan Diklat Pemda.

2. Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi Kompetensi dilakukan untuk menjamin kompetensi ASN jabatan fungsional tertentu agar terwujud kinerja aparatur yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu dilakukan seleksi dan uji kompetensi yang kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi bagi ASN yang dinyatakan lulus / kompeten.

Di tahun 2017, target awal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi 250 orang ASN. Namun dalam perkembangannya, sertifikasi kompetensi dilakukan bagi 2 jenis

jabatan fungsional yaitu Polisi Pamong Praja dan Penyuluh Kehutanan dengan target total peserta sejumlah 280 orang. Adapun realisasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi yaitu **279** orang ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Selisih 1 (satu) orang peserta dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri. Secara rinci capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Peserta
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN Tahun 2017

No	Kegiatan / Diklat	Jumlah Peserta	
		Target	Realisasi
1.	Sertifikasi Kompetensi Polisi Pamong Praja	250	249
2.	Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Kehutanan	-	30
	TOTAL	250	279
PERSENTASE PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI (%)			111,60

Capaian kinerja di tahun 2017 yaitu 111,60 %, relatif lebih rendah bila dibandingkan kinerja di tahun 2016 yang mencapai 202%. Dan dari hasil identifikasi kebutuhan, jumlah PNS yang membutuhkan sertifikasi kompetensi (utamanya untuk jabatan fungsional) masih relatif banyak, sehingga kegiatan ini akan terus berkelanjutan dan semakin berkembang target pesertanya.

Berdasar data capaian hingga Tahun 2017 secara keseluruhan, sebenarnya target capaian akhir RPJMD maupun Renstra SKPD sudah tercapai. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian indikator sasaran-1 di Tahun 2017 adalah 109,51%, melampaui target capaian hingga tahun ke-4 yaitu sebesar 81,55%. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM masih terdapat adanya hambatan yang perlu diselesaikan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Tujuan-1, yaitu :

- 1) Masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan peningkatan kompetensi jabatan peserta dengan diklat yang diikutinya;

- 2) Keterbatasan skema pelaksanaan sertifikasi kompetensi (terkait kapasitas kelembagaan).

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam menjaring data mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi;
- 2) Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* atau instansi pembina jabatan fungsional tertentu dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang akan ditempuh strategi :

- 1) Menganalisis data kebutuhan pengembangan kompetensi untuk merancang jenis pengembangan kompetensi yang sesuai;
- 2) Mendorong penyusunan skema sertifikasi kompetensi sekaligus model kelembagaan sertifikasi profesi yang mampu menjangkau seluruh ASN di Jawa Tengah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Tujuan-1 adalah sebesar Rp 29.279.296.648,- atau 87,93 % dari total pagu anggaran Rp 33.299.307.000,- Artinya, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 4.020.010.352,- atau 12,07 % dari pagu yang ditetapkan.

TUJUAN-2	<i>Meningkatkan pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>
SASARAN	<i>Meningkatnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>
Indikator Kinerja	<i>Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>

Sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Tujuan-2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
(Sasaran Strategis Tujuan-2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d Th. 2016 (dok)	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (dok)	Capaian Renstra SKPD s.d. Th. 2017 (%)
			Target Kinerja (dok)	Realisasi (dok)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Meningkatnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat</i>	Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat	2.021	2.263	2.310	102	2.613	88,44
	Jumlah	2.021	2.263	2.310	102	2.613	88,44

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Tujuan-2 berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini berkategori **Sangat Baik**, yaitu dari target 2.263 dokumen yang direncanakan, realisasi kinerja yang dicapai sejumlah 2.310 dokumen (102%). Adapun indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat dipengaruhi oleh : pengembangan diklat, pengendalian mutu diklat, pengembangan kapasitas tenaga pengembang kompetensi, sistem manajemen mutu serta penyusunan pedoman / petunjuk teknis kediklatan.

Pengembangan diklat merupakan upaya untuk meningkatkan diklat dari segi perencanaan diklat. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan proses dan hasil dari diklat akan sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan diklat adalah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat (AKD), kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi, serta fasilitasi penyusunan kurikulum diklat baru bagi Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengkajian

dan Pengembangan Diklat, yang dilaksanakan dalam wujud penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Analisis kebutuhan diklat / identifikasi kebutuhan diklat berbasis teknologi informasi, yaitu melalui SiJARI On AKD yang kemudian diselaraskan dengan para *stakeholder* terkait melalui forum Sinkronisasi Program Diklat dengan hasil sejumlah 1 dokumen;
- Penyusunan / pengembangan kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi yang menghasilkan 6 kurikulum dan 36 modul diklat;
- Fasilitasi penyusunan kurikulum diklat baru, dengan hasil 5 kurikulum bagi penyelenggaraan diklat di Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Banyumas dan Cilacap.

Selain diukur dari perencanaan dan proses penyelenggaraan diklat sebagaimana diuraikan di atas, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat sebagai upaya pengendalian mutu diklat. Pengendalian mutu diklat adalah proses pengukuran dari perencanaan diklat, proses penyelenggaraan diklat, pengembangan diklat dan evaluasi terhadap alumni diklat.

Pencapaian sasaran sesuai indikator tersebut dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat, yang dilaksanakan dalam wujud penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 116 dokumen;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat di Kabupaten/Kota sejumlah 70 dokumen;
- Pelaksanaan evaluasi pra diklat yang diselenggarakan di BPSDMD sejumlah 38 dokumen;
- Pelaksanaan evaluasi pasca diklat dengan hasil sejumlah 4 dokumen;
- Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat dengan hasil 1 dokumen.

Pengembangan dan pengendalian mutu diklat juga ditunjang oleh pengembangan kapasitas tenaga pengembang kompetensi yaitu pejabat

fungsional Widyaiswara. Wujudnya berupa karya ilmiah sebagai hasil partisipasi Widyaiswara dalam kegiatan Seminar Nasional dan Orasi Ilmiah. Di tahun 2017, dilaksanakan Seminar Nasional bagi 4 (empat) orang Widyaiswara dengan hasil 4 dokumen Karya Tulis Ilmiah, serta 2 dokumen hasil Orasi Ilmiah bagi 2 (dua) orang Widyaiswara yang tahun ini dilaksanakan di LAN RI.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan diklat juga perlu dijamin prosesnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem manajemen mutu yang menjadi tolok ukur penjaminan tersebut. Selain itu pencapaian sasaran juga dihasilkan melalui penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang pengembangan kompetensi yang menjadi ranah kebijakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsinya. *Output* yang dihasilkan menjadi salah satu indikator kinerja yang terkait dengan pengembangan dan pengendalian mutu pengembangan kompetensi SDM aparatur. Hal ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Reformasi Kediklatan, dengan hasil dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Pemeliharaan ISO 9001:2015 (1 dokumen);
- Akreditasi penyelenggaraan Diklat Teknis (Kesejahteraan Sosial) dan Diklat Fungsional (Polisi Pamong Praja);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Fasilitasi Pengembangan SDM;
- Peraturan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/14346 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan SIMAPAN SDM;
- Peraturan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 tentang Standar Sumber Daya Pelatihan.

Secara keseluruhan, persentase capaian Sasaran Strategis Tujuan-2 sesuai indikator kinerja di tahun 2017 ini yaitu 102 %, relatif lebih rendah bila dibanding capaian di tahun 2016 yang mencapai 105 %. Meski capaian dokumen tersebut melebihi target kinerja tahunan, namun masih ada

beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Tujuan- 2, diantaranya adalah :

- 1) Kurangnya informasi mengenai kebutuhan kurikulum yang harus disusun;
- 2) Penyelesaian dokumen mengalami keterlambatan karena menyesuaikan jadwal kegiatan internal dalam penyiapan bahan dan penyusunan dokumen pedoman / petunjuk teknis.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Bidang Penyelenggara untuk menyampaikan kebutuhan kurikulum yang harus disusun;
- 2) Membuat jadwal penyusunan pedoman secara detail agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi :

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan kurikulum yang akan disusun secara lebih intensif di awal tahun dengan peningkatan koordinasi dengan Bidang Penyelenggara;
- 2) Penataan jadwal penyusunan pedoman / petunjuk teknis secara detail, baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Tujuan-2, adalah sebesar Rp 2.017.967.861 atau 87,85 % dari total pagu sebesar Rp 2.297.126.000,-. Artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 279.158.139,- atau 12,15 % dari pagu yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2017, didukung dengan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 51.379.690.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 5.216.831.000,-.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 44.766.193.000,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 1.396.666.000,-

Adapun realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp 46.053.053.312,- (89,63%) dengan rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 2. Sedangkan penggunaan anggaran yang terkait dengan pencapaian sasaran dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

**Realisasi Anggaran Berdasar Kinerja Pencapaian Sasaran
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	33.299.307.000	29.279.296.648	87,93
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2.297.126.000	2.017.967.861	87,85

Dari sisi penyerapan, realisasi anggaran BPSDMD Tahun 2017 yang mencapai 89,63% itu mengalami kenaikan sebesar 1,10 % apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2016 yang mencatatkan angka penyerapan sebesar 88,53%. Anggaran belanja dialokasikan sesuai kebutuhan dan regulasi / standarisasi biaya yang berlaku, dengan tetap mengutamakan prinsip optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah **Berhasil** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 98,95 %, dengan rincian persentase sebagai berikut :
 - Tujuan-1 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi sebesar 109,51 %.
 - Tujuan-2 dengan Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat sebesar 88,40 %.
2. Realisasi anggaran belanja langsung Rp 46.060.526.812,- (89,65 %) dari alokasi sejumlah Rp 51.379.690.000,- menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 10,35%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPSDMD di masa mendatang antara lain :

- 1) Menganalisis data kebutuhan pengembangan kompetensi untuk merancang jenis pengembangan kompetensi yang sesuai;
- 2) Mendorong penyusunan skema sertifikasi kompetensi sekaligus model kelembagaan sertifikasi profesi yang mampu menjangkau seluruh ASN di Jawa Tengah.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan kurikulum yang akan disusun secara lebih intensif di awal tahun dengan peningkatan koordinasi dengan Bidang Penyelenggara;
- 4) Penataan jadwal penyusunan dokumen petunjuk teknis secara detail, baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Demikian LKjIP BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024 – 7473066 Faksimile 024 – 7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SARI PUSPITA ANDRIANI SULISTYOWATI, SH

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Februari 2017

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SP. ANDRIANI SULISTYOWATI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19580612 198703 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi	Tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> 1) Jumlah ASN yang mengikuti diklat 2) Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi	83 % 1) 3.536 orang 2) 250 orang
2.	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian mutu diklat	Tingkat efektivitas pengembangan dan pengendalian mutu diklat <i>Capaian sasaran diukur melalui :</i> Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat	100 % 286 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Rp. 32.384.461.000	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 3.000.510.000	APBD
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 8.134.410.000	APBD
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 6.562.028.000	APBD
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 370.000.000	APBD

Semarang, Februari 2017

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

S.P. ANDRIANI S., SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580612 198703 2 005

Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.958.765.000	8.368.953.240	589.811.760	93,42
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional	6.036.667.000	5.283.726.485	752.940.515	87,53
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	13.299.612.000	10.897.913.381	2.401.698.619	81,94
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemda	221.610.000	213.982.300	7.627.700	96,56
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	129.155.000	124.256.269	4.898.731	96,21
		Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./ Kota se Jateng	4.362.295.000	4.115.044.391	247.250.609	94,33
		Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	291.203.000	275.420.582	15.782.418	94,58
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	900.000.000	805.767.600	94.232.400	89,53
		Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	786.673.000	708.957.800	77.715.200	90,12
		Kegiatan Reformasi Kediklatan	332.167.000	276.561.221	55.605.779	83,26
		Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	278.286.000	226.681.240	51.604.760	81,46
		Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	146.148.000	115.318.600	30.829.400	78,91
		Kegiatan Media Informasi Diklat	274.773.000	217.803.977	56.969.023	79,27
		Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	198.463.000	140.629.000	57.834.000	70,86
3	Program Pelayanan Administrasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	6.521.070	228.930	96,61

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.620.500.000	1.447.440.434	173.059.566	89,32
		Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	180.000.000	179.684.000	316.000	99,82
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.433.886.000	1.141.448.000	292.438.000	79,61
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	181.013.000	180.901.000	112.000	99,94
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	148.536.800	1.463.200	99,02
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000	119.654.500	345.500	99,71
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.250.000	261.981.000	1.269.000	99,52
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	32.863.000	29.296.000	3.567.000	89,15
		Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	200.000.000	198.046.500	1.953.500	99,02
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	397.500.000	396.981.767	518.233	99,87
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	4.183.648.000	3.933.488.592	250.159.408	94,02
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	32.000.000	30.655.000	1.345.000	95,80
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.005.498.000	2.987.720.000	17.778.000	99,41
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	335.837.000	332.182.518	3.654.482	98,91
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	450.000.000	445.212.625	4.787.375	98,94

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
		kantor				
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	225.000.000	224.409.050	590.950	99,74
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	224.750.000	223.543.926	1.206.074	99,46
		Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	18.750.000	14.154.000	4.596.000	75,49
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	302.962.000	274.955.000	28.007.000	90,76
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.364.666.000	1.279.010.540	85.655.460	93,72
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	435.000.000	433.688.404	1.311.596	99,70